

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

PEKANBARU

2.1 Sejarah Umum KPP Madya Pekanbaru

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru, beralamat di JL.MR.SM.Amin (Ring Road Arengka II) Pekanbaru, didirikan berdasarkan KMK Nomor 238/KMK 01/2006 tanggal 9 mei 2006 dan mulai efektif sejak tanggal 1 juli 2006. Dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau kecuali Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang. Struktur kantor ini menganut pradigma baru, yaitu berdasarkan fungsi sehingga tanggung jawab wewenang serta alur kerja sama masing-masing unit menjadi lebih fokus, yang pada akhirnya akan menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam pemberian pelayanan, bimbingan dan pengawasan pada wajib pajak. Alamat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru sekarang masih menempati gedung bersama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan di JL.MR.SM.Amin (Ring Road Arengka II) Pekanbaru.

2.2 Visi Dan Misi KPP Madya Pekanbaru

a. Visi

Menjadi institusi penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah asia tenggara.

b. Misi

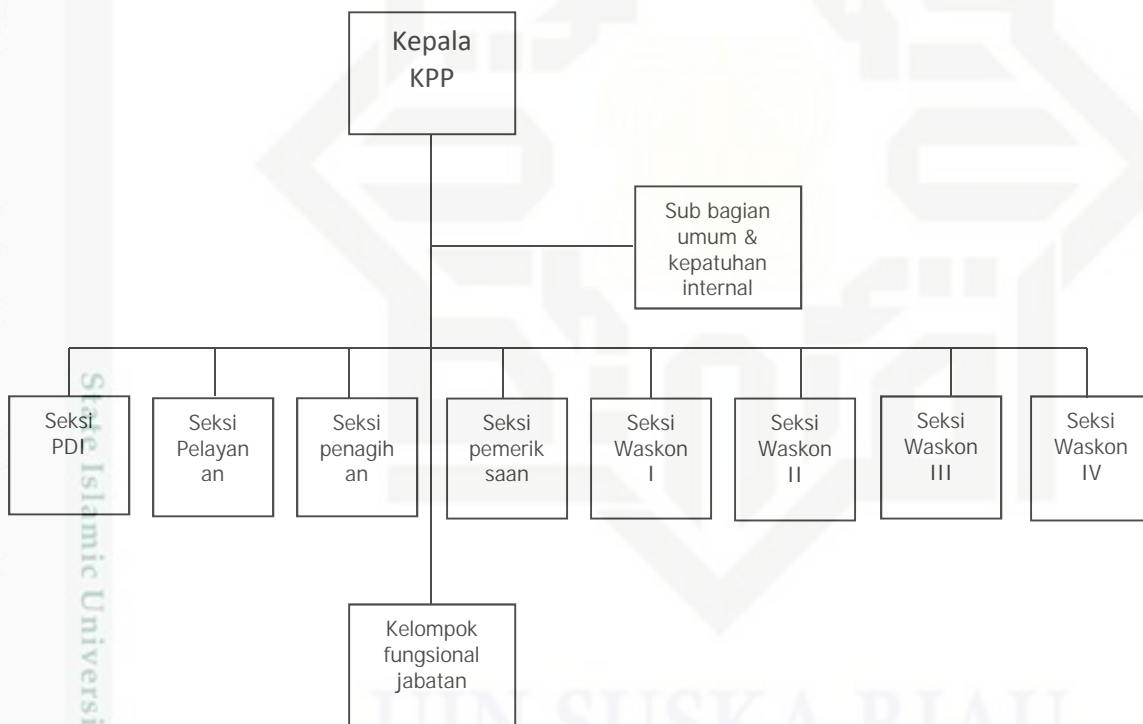
Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menetapkan undang-undang perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan Negara demi kemakmuran rakyat.

Struktur Kantor ini menganut paradigma baru, yaitu berdasarkan fungsi sehingga tanggung jawab dan wewenang serta alur kerja masing-masing unit menjadi lebih fokus.

2.3 Struktur Organisasi KPP Madya Pekanbaru

Gambar II.1

Struktur Organisasi Kpp Madya Pekanbaru



Sumber : KPP Madya Pekanbaru

2.4 Uraian Tugas / Unit Kerja KPP Madya Pekanbaru

1. Kepala Kantor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengkordinasikan penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak sebagai bahan penyusunan rencana strategis kantor wilayah. Dan mengkordinasikan penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu.

2. Sub Bagian Umum

Mengkordinasikan tugas pelayanan kesekretaritan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta rumah tangga perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas kantor Pelayanan Pajak.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Melakukan pengumpulan, pencarian dan pengelolaan data, penyajian Informasi Perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT, e-Faktur dan e-filing serta penyiapan laporan kinerja.

4. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

5. Seksi Penagihan

Adapun tugas dari seksi penagihan adalah sebagai berikut :

- a. Penagih aktif.
- b. Penundaan dan angsuran tunggakan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Urusan penata usahaan piutang pajak.
 - d. Membuat keputusan atas permohonan angsuran/penunda pembayaran piutang pajak dari Wajib Pajak.
 - e. Memberi Surat Tagihan.
6. Seksi Pemeriksaan
- Mempunyai tugas usulan pemeriksaan, penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, pemantauan serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. Pengendalian internal, pengelolaan resiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tidak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.II.III.IV
- Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kerja Wajib Pajak melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak dan melakukan evaluasi hasil banding seksi pengawasan dan konsultasi.
8. Kelompok Fungsional Pemeriksaan Pajak
- Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undngan yang berlaku.